

B A B II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Kompilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014

Evaluasi kinerja tahun 2014 merupakan tahapan dalam penyusunan Perubahan RKPD 2014 dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan evaluasi kinerja RKPD 2014 antara lain untuk menilai/mengidentifikasi realisasi sasaran dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau untuk mengetahui program kegiatan yang belum selesai 100 persen yang menjadi pertimbangan untuk diusulkan kembali didalam Perubahan RKPD Tahun 2015.

Gambaran mengenai evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2014, adalah sebagaimana disajikan pada lampiran I dokumen Perubahan RKPD Tahun 2015 ini.

2.2 Kompilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2015

Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015, dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi/meninventarisasi sejauh mana program kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Sehingga dapat diketahui pada Perubahan RKPD ini, program kegiatan tersebut apakah dapat dilanjutkan atau tidak, kecukupan pagu anggarannya, kesesuaian terhadap target kinerjanya dan hal lainnya yang menjadi dasar kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan penyesuaian terhadap program kegiatan tersebut.

Kondisi capaian kinerja RKPD 2015 sampai dengan Triwulan II, sebagaimana disajikan pada tabel II.1 berikut:



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
01				WAJIB								
01	01			PENDIDIKAN								
01	01	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini								
				APK PAUD	50,04%	31,87%	37,97%			31,87%	63,69%	DINDIK
				Prestasi PAUD Tk. Nasional (TK/RA Terakreditasi min B)	2	1	2			1	50%	DINDIK
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun								
				APK SD/MI	116,26%	116,23%	116,26%			116,23%	99,97%	DINDIK
				APK SMP/MTs	97,96%	99,77%	95,75%			99,77%	101,85%	DINDIK
				APM SD/MI	97,00%	97,01%	96,23%			97,01%	100%	DINDIK
				APM SMP/MTs	84,00%	72,21%	76,14%			72,21%	85,96%	DINDIK
				Angka DO SD/MI	0,30%	0,39%	0,36%			0,39%	130%	DINDIK
				Angka DO SMP/MTs	0,40%	0,72%	0,60%			0,72%	180%	DINDIK
				Persentase Kelulusan SD/MI	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	DINDIK
				Persentase Kelulusan SMP/MTs	99,35%	99,86%	99,27%			99,86%	100%	DINDIK
				Angka Melanjutkan SD/MI	100,00%	97,72%	98,48%			97,72%	97,72%	DINDIK
				Angka Melanjutkan SMP/MTs	100,00%	99,54%	97,98%			99,54%	99,54%	DINDIK
				Angka Mengulang SMP/MTS	0,45%	-	0,62%			-	100%	DINDIK
				Angka Mengulang SD/MI	4,00%	-	5,87%			-	100%	DINDIK
01	01	18		Program Pendidikan Non Formal								
				Jumlah Warga Belajar Paket A, B dan C	10.432	-	9.172			-		DINDIK
				Angka Buta Aksara	2,50%	3,60%	3,25%			3,60%		DINDIK
				Persentase Kelulusan UNPK	78,00%		0%				100%	DINDIK
				Persentase Pengangguran Terlatih	19,23%	17,88%	18,31%			17,88%	92,98%	DINDIK
01	01	22		Program Manajemen Layanan Pendidikan								
				Tersedianya Gambaran Umum Pendidikan di Prov. Kep. Babel	2 Dok		2 Dok			-	100%	DINDIK
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Pendidikan	4 Dok		3 Dok			-	100%	DINDIK
				Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi	3 Dok		3 Dok			-	100%	DINDIK
01	01	28		Program Pendidikan Menengah dan Tinggi								
				APK SMA/MA/SMK	95,95%	84,14%	89,60%			84,14%	87,69%	DINDIK
				APM SMA/MA	75,00%	58,60%	61,06%			58,60%	78,13%	DINDIK
				Angka DO SMA/MA	0,31%	1,26%	1,66%			1,26%		DINDIK



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				Persentase Kelulusan Siswa SMA/MA	99,00%	99,90%	99,43%			99,90%	101%	DINDIK
				Angka Mengulang Pendidikan Menengah	0,60%	0,83%	0,83%			0,83%	138,33%	DINDIK
				Persentase Kelulusan Siswa SMK	99,00%	99,90%	99,70%			99,90%	101%	DINDIK
				Siswa Miskin Berprestasi yang melanjutkan	750 Org	-	-			-	100%	DINDIK
02				WAJIB								
2	2	1		KESEHATAN								
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan								
				Persentase ketersediaan obat buffer stock untuk pelayanan kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota.	100		300			100	100%	Dinkes
2	2	2		Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
				Jumlah Kematian Ibu Melahirkan per Kelahiran Hidup (IKU)	27		31			31	115%	Dinkes
				Persentase Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (IKU)	98		97,5			97,5	99%	Dinkes
				Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Dasar (IKU)	28		31			31	111%	Dinkes
				Persentase Kab/kota Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar (SPM)	100		100			100	100%	Dinkes
2	2	3		Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat								
				Persentase Kab/Kota Dengan Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (IKU)	70		60			60	85,71%	Dinkes
				Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Posyandu Mandiri (IKU)	40		30			30	75,00%	Dinkes
2	2	4		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	78		65			65	83,33%	Dinkes
2	2	5		Program Pengembangan Lingkungan Sehat								
				Persentase Rumah Sehat Yang Memenuhi Syarat Kesehatan (IKU)	90		85			85	94,44%	Dinkes
				Persentase Penduduk Yang Mengakses Air Minum Berkualitas	74		68			68	91,89%	Dinkes
2	2	6		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				Angka Kesakitan Malaria per 1000 Penduduk (API) (IKU)	1		2			2	200,00%	Dinkes
				Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk (IKU)	46		51			51	110,87%	Dinkes
				Prevalensi HIV (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) (IKU)	10		10			10	100,00%	Dinkes
				Persentase Kasus Baru TB 89 Paru (BTA Positif) yang disembuhkan	90		90			90	100,00%	Dinkes
2	2	8		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	100	100			100	100,00%	Dinkes
2	2	9		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.								
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar (Iku)	100		100			100	100,00%	Dinkes
2	2	11		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan								
				Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk (IKU)	9,7		7,5			7,5		Dinkes
				Rasio dokter umum per 100.000 penduduk (IKU)	34,4		29,7			29,7		Dinkes
				Rasio perawat per 100.000 penduduk (IKU)	337,6		282,5			282,5		Dinkes
				Rasio Bidan per 100.000 penduduk (IKU)	96		80,8			80,8		Dinkes
2	2	12		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	28	31			31	111%	Dinkes
2	2	13		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Meningkatnya Kab/Kota dengan cakupan pelayanan lansia (Persentase)	100	85			85	85,00%	Dinkes
2	2	14		Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase cakupan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	85	70			70	82,35%	Dinkes
2	2	15		Program Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan anak								
				Jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup (IKU)	27		31			31	115%	Dinkes



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	28		31			31	111%	Dinkes
2	2	16		Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	100		100			100	100%	Dinkes
2	2	17		Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya	100		100			100	100%	Dinkes
2	2	18		Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang balai Labkes	95		80			80	84%	Dinkes
2	2	19		Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan								
				Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk (IKU)	9,7		7,5			7,5	77%	Dinkes
				Rasio dokter umum per 100.000 penduduk (IKU)	34,3		29,7			29,7	87%	Dinkes
				Rasio perawat per 100.000 penduduk (IKU)	337,6		282,5			282,5	84%	Dinkes
				Rasio bidan per 100.000 penduduk (IKU)	96		80,8			80,8	84%	Dinkes
2	2	20		Program Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan	100		100			100	100%	Dinkes
02				WAJIB								
2	2	1		KESEHATAN								
2	2	2		Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
				Tersedianya Jasa Operasional dan Jasa Pelayanan Bagi Tenaga Medis dan Non Medis	265		265			265	100%	RSJ
				Jumlah Kunjungan Ke puskesmas dan Rumah Keluarga Pasien	95		80			85	89%	RSJ
				Jumlah Tenaga Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	22		16			18	82%	RSJ
				Jumlah Pasien Yang Menerima terapi mental Sosial	500		385			420	84%	RSJ
				Jumlah Anak Yang dilayani Pada Unit Tumbuh Kembang Anak	170		155			160	94%	RSJ
				Jumlah Pelayan Rumah Sakit	25		20			22	88%	RSJ
2	2	7		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				Persentase Capaian Nilai Yang diterima (Standar Join Commision International (JCI))	50% (Madya)		25% (Pratama)			37,50		RSJ
				Jumlah Sertifikat BLUD Yang Diterima	100% (BLUD Penuh)							RSJ
				Jumlah Standar Pelayanan Kesehatan Yang Tersusun	7		4			5	71,43%	RSJ
				Jumlah Sertifikat Izin Mendirikan Rumah Sakit Yang Diterima	1							RSJ
				Jumlah Sertifikat/Izin AMDAL Yang Terbit	1							RSJ
2	2	9		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.								
				Jumlah Alat Sehat Belanja Modal dan Berbekalan Kesehatan	60		45			50	83,33%	RSJ
				Jumlah Obat Generik dan Non 66 Generik Yang Tersedia	85		70			75	88,24%	RSJ
				Jumlah Pelengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	45		40			40	88,89%	RSJ
				Jumlah Gudang Obat/apotik								RSJ
				Jumlah Ruang Terapi Yang Dikembangkan	2							RSJ
				Jumlah Ruang rontgen Rumah Sakit	1							RSJ
				Jumlah Gedung Dapur Bersih	1							RSJ
				Jumlah Gedung Trauma Center	1							RSJ
				Jumlah Ruang Laboratorium	2							RSJ
				Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit	1							RSJ
				Jumlah Bangunan Rumah Sakit Yang Di rehabilitasi	5		1			1	20,00%	RSJ
				Jumlah Sertifikat Penetapan Tipe Rumah Sakit	1							RSJ
				Jumlah Sistem Informasi Kegiatan Rekam Medis	1							RSJ
				Jumlah Sistem Informasi Kegiatan Instalasi Farmasi	1							RSJ
				Jumlah Sistem Informasi Manajemen	1					1	100,00%	RSJ



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				Rumah Sakit								
				Jumlah Billing Sistem Yang Tersedia	1		1					RSJ
				Jumlah Ruang Rawat Inap Yang Dikembangkan	2		1					RSJ
				Jumlah Ruang Rawat Jalan Yang Dikembangkan	2		1					RSJ
				Jumlah Kamar Jenazah Yangt Dibangun	1		1					RSJ
2	2	10		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.								
				Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkalah Rumah Sakit	1	0	1	0		1	100%	RSJ
				Jumlah Pemeliharaan Rutin Ruang Rawat Inap Rumah Sakit	1		1			1	100%	RSJ
				Jumlah Pemeliharaan Rutin Kamar Jenazah	1		1					RSJ
				Jumlah Alat Kesehatan Yang Dipelihara	3		3			3	100%	RSJ
				Jumlah Alat Kesehatan Yang Teruji dan terkalibrasi	3		3			3	100%	RSJ
				WAJIB								
				PEKERJAAN UMUM								
2	3	1		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan								
				Jalan yang terbangun	12,00		3km			3,00	25,00%	Dinas PU
				Jembatan yang terbangun sepanjang 366 meter	1.870,00		374km			374,00	20,00%	Dinas PU
				Peningkatan jalan dan jembatan provinsi sepanjang 53,61 km	125,00		25km			25,00	20,00%	Dinas PU
2	3	2		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	874,33 km	Pemeliharaan jalan sepanjang 816.2 km	874,33km			874,33 km	100%	Dinas PU
2	3	3		Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan		-						
				Terpeliharanya jalan/jembatan yang dilakibatkan bencana alam atau lainnya yang memerlukan penanganan darurat	3,00	100%	1 unit			1,00	33,33	Dinas PU
2	3	4		Program Pembangunan Sistem	Tersedianya dokumen database jalan	7 Dokumen	4 dokumen	2 dokumen		2 Dokumen	29%	Dinas PU



Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
			Informasi/database Jalan dan Jembatan	dan jembatan provinsi	dengan 24,19% total panjang jalan provinsi	dengan 12,14 % total panjang jalan provinsi						
2	3	5	Program Perencanaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan	1 gedung workshop, 70% alat-alat berat dan alat-alat laboratorium	31 % alat-alat berat dan alat laboratorium	2 unit alat-alat berat dan alat lab			2 unit alat-alat berat alat lab	100%	Dinas PU
2	3	6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Terwujudnya sistem jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan	7.572	1.000 Ha	1,429 Ha			1,429 Ha	19%	Dinas PU
2	3	7	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Terwujudnya layanan air baku untuk air minum	75 Ha	6 Ha	20 Ha			20 Ha	27%	Dinas PU
2	3	8	Program Penyediaan dan Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Tersedianya sumber air yang mampu untuk memenuhi kebutuhan terhadap air	98 Ha	5 Ha	20 Ha			20,00	#VALUE!	Dinas PU
2	3	9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Tersedianya sumber air baku, bersih dan pengelolaan limbah	Tersedianya sumber air baku, bersih dan pengelolaan limbah	Jumlah prasarana air bersih dikws khusus 20%	3 kws di ksk/ksp/ksn			3 kws di ksk/ksp/ksn	100%	Dinas PU
2	3	10	Program Pengendalian Banjir	Terwujudnya sistem pengendalian banjir	52.515 M ²	2.000 M ³	8.099 M			8,099 M	15%	Dinas PU
2	3	11	Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	tersedia infrastruktur dikawasan strategis, khusus dan potensial	3 kws di ... ksk/ksp/ksn	Jumlah Jaringan jalan di kws strategis, khusus dan potensial 35% kws minapolitan/agropolitan, KEK dll	3 kws di ksk/ksp/ksn			3 kws di ... ksk/ksp/ksn	100%	Dinas PU
2	3	12	Program Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur perdesaan	Tersedianya infrastruktur dikawasan perdesaan								
					6 kws di 3 kab	Jumlah kws yang ditambah Kuantitas dan kualitas jalan perdesaan 45%	2 kws di 2 kab			2 kws di 3 kab	100%	Dinas PU
					35 desa	Luas kawasan	30 desa di 6			35 desa	100%	Dinas PU



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
							Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
					kumuh/miskin/tertinggal perdesaan 35 %	kab					
				10 desa di 6 kab	Jumlah Desa terlayani air minum 45%	10 desa di 6 kab			30 desa di 6 kab	100%	Dinas PU
				6 desa/6 kab	Jumlah desa kumuh yg terlayani pengelolaan limbah/persampahan 30%	6 desa/6 kab			10 desa di 6 kab	100%	Dinas PU
				6 desa/6 kab	Luas kawasan genangan air/rawan banjir 45%	6 desa/6 kab			6 desa/6 kab	100%	Dinas PU
			URUSAN WAJIB								
			PERUMAHAN								
2	4	1	Program Perencanaan Pengembangan Perumahan	Terbangun sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	135 unit di 7 kab/kota	terdapat 65% rumah tidak layak huni yg belum tertangani	135 unit di 7 kab/kota		135 unit di 7 kab/kota	100%	Dinas PU
2	4	2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi MBR	7 kws di 7 kab/kota	terdapat 60% kws MBR yang belum terlayani air bersih dan sanitasi	7 kws di 7 kab/kota		7 kws di 7 kab/kota	100%	Dinas PU
2	4	3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Terwujudnya sarana lingkungan perumahan dan kumuh permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat	50 desa di 7 kab/kota	terdapat 70% kws/desa tertinggal kekurangan sarana perumahan dan permukiman	50 desa di 7 kab/kota		50 desa di 7 kab/kota	100%	Dinas PU
2	4	4	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Tertanganinya lingkungan perumahan dan kumuh permukiman yang terkena dampak bencana alam/sosial	7 kws di 7 kab/kota	terdapat perumahan dan kws	7 kws di 7 kab/kota		7 kws di 7 kab/kota	100%	Dinas PU



Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
01	07		URUSAN WAJIB			permukiman yang berada di daerah/kws rawan bencana						
			PERUHUBUNGAN									
2	7	1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan									
				Pengembangan pelabuhan tanjung belikat			1.000					DISHUB
				Pengembangan pelabuhan tanjung batu			1.000					DISHUB
				Pengembangan status bandara depati amir menjadi internasional	Tersedianya kajian pengembangan bandara dan penambahan area		1.000					DISHUB
				Tahapan persiapan pengembangan pelabuhan pengumpul san pelabuhan pengumpan dibangka belitung	Pemenuhana pelabuhan pengumpul dan pengumpan	Persiapan pengembangan pelabuhan	750 persiapan pengembangan pelabuhan			750 persiapan pengembangan pelabuhan		DISHUB
				Rintisan pengadaan angkutan laut	terpenuhinya angkutan laut hingga 55%	45%	45			50		DISHUB
2	7	2	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ									
				Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ sampai 85%	Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ sampai 85%	Pemeliharaan rutin prasarana transportasi di jalan nasional/provinsi	Pemeliharaan rutin prasarana transportasi di jalan nasional/provinsi			Pemeliharaan rutin prasarana transportasi di jalan nasional/provinsi	100%	DISHUB
						pemeliharaan rutin 2 (dua) jembatan timbang	pemeliharaan rutin 2 (dua) jembatan timbang			pemeliharaan rutin 2 (dua) jembatan timbang	100%	DISHUB
				Tersedianya angkutan umum yang nyaman dan memenuhi standar	Tersedianya angkutan massal sebanyak 18 unit	Peremajaan angkutan massal 4 unit	Peremajaan angkutan massal 4 unit			Peremajaan angkutan massal 4 unit	100%	DISHUB
				Peningkatan fasilitas pelayanan angkutan	Tersedianya	Pengembangan	Evaluasi kinerja			Pengembang	100%	DISHUB



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				umum AKDP dan AKAP	terminal terpadu sebanyak 2 terminal dan pengembangan terminal AKDP sebanyak 3 terminal	terminal AKDP 2 kab	terminal AKDP dan penetapan terminal terpadu			an terminal AKDP 2 kab		
				Peningkatan pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan setiap tahun	Pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan naik menjadi 70%	Pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan naik menjadi 55%	Pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan naik menjadi 55%			Pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan naik menjadi 60%	100%	DISHUB
				Peningkatan kualitas pemeriksaan dan pengawasan terhadap kelebihan muatan angkutan barang	Pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana jembatan timbang dalam keadaan baik	pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana jembatan timbang	pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana jembatan timbang			pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana jembatan timbang		DISHUB
2	7	3		Program Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan								
				Pembangunan terminal	Terlaksananya pembangunan terminal di 7 kab/kota	Peningkatan status terminal yang ada	Peningkatan status terminal yang ada			Peningkatan status terminal yang ada	100%	DISHUB
				Pembangunan dermaga di pulau-pulau kecil berpenduduk	Terpenuhinya dermaga di pulau-pulau kecil berpenduduk hingga 35%	30%	25			30	100%	DISHUB
				Rehabilitasi dermaga tukak sadai	Rehabilitasi dermaga tukak sadai hingga 100%	-				Dermaga tukak sadai	100%	DISHUB
				Peningkatan pelabuhan beserta pembanguna sarana penunjang	Peningkatan pelabuhan	95%	90			95	100	DISHUB



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
		pelabuhan tanjung batu	beserta pembangunan sarana penunjang pelabuhan tanjung batu hingga 100%							
		Pengembangan Bandara Depati Amir			100				100	DISHUB
1.08.1.08.02	URUSAN WAJIB									
	LINGKUNGAN HIDUP									
1.08.1.08.02.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan									
		Terkoordinasinya pengelolaan sampah dan lahan	7 Kab/Kota	5 Kab/Kota	4 Kab/Kota			5 Kab/Kota	71%	BLHD
		Cakupan pelayanan persampahan	3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel	Lanjutan penyelesaian 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel	Lanjutan penyelesaian 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel			Lanjutan penyelesaian 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel	100%	Dinas PU
1.08.1.08.02.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup									
		Terpantaunya status mutu air	7 smbr air	5 smbr air	4 smbr air					BLHD
		Meningkatnya kualitas dan kapasitas serta jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan PPNS Bidang Lingkungan Hidup	18 org	14 org	12 org					BLHD
		Tersosialisasinya Gerakan Sadar Lingkungan pada masyarakat	1500 org	1000 org	750 org					BLHD
		Adanya Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup	18 kasus	3 kasus	5 kasus					BLHD
		Terbinanya dan terpantaunya Pelaksanaan RKL dan RPL	50 keg	35 keg	25 keg					BLHD
		Terbinanya dan Terawasinya Komisi Penilai AMDAL	7 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota					BLHD
		Terpantaunya kegiatan usaha wajib AMDAL	45 keg/usaha	35 keg/usaha	30 keg/usaha					BLHD
		Terinventarisasinya Kerusakan Lingkungan Hidup	1 dokumen	-	1 dokumen					BLHD
1.08.1.08.02.19	Program Peningkatan Kualitas dan									



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab	
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)	
	Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup										
		Terbangunnya Jaringan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	8 jaringan	6 jaringan	4 jaringan			6 jaringan	100,00%	BLHD	
		Terinventarisasinya Status Lingkungan Hidup Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	100,00%	BLHD	
		Terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanaman dan hutan alam	terbentuknya dan beroperasinya KPHL, sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanaman dan alam	terbentuknya 2 unit KPHP model di Bangka	terbentuknya 2 unit KPHP model di bangka tengah			terbentuknya 2 unit KPHP model di Bangka	100,00%	DISHUT	
1.08.1.08.02.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Terpantaunya status mutu udara	7 Kota	5 kota	4 kota			5 kota	71,43%	BLHD	
1.08.1.08.02.19	Program pengelolaan ruang terbuka hijau										
		Tingkat kualitas lingkungan dalam rangka pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan terpadu	14 KSP (30%)	RTH 4 KSP	RTH 4 KSP			RTH 4 KSP	28,57%	Dinas PU	
		Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau di Prov. Kep. Babel	7 Kab/Kota	1 kab/kota	1 kab/kota			1 kab/kota	100%	BLHD	
	11	URUSAN WAJIB									
		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	11	20	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat								
			Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	18,6 % (8 dari 43 SKPD)	4,6% (2 dari 43 SKPD)	9,3% (4 dari 43 SKPD)	4,6% (2 dari 43 SKPD)	100%	9,3% (4 dari 43 skpd)	50%	BPPKBPA
			Persentase SKPD yang memiliki data terpilah	23,3 % (10 dari 43 SKPD)	18,6 % (8 dari 43 SKPD)	18,6 % (8 dari 43 SKPD)	18,6 % (8 dari 43 SKPD)	100%	18,6% (8 dari 43 skpd)	80%	BPPKBPA
			Jumlah lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan	32 Instansi		7 instansi vertikal		100%	30	94%	BPPKBPA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				perempuan								
1	11	21		Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan								
				Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan peran serta posisi perempuan	1 kebijakan		1 kebijakan		100%	1 kebijakan	100%	BPPKBPA
				Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	6,06%	5,96%	5,99%	5,96%	491,36%	5,99%	99%	BPPKBPA
				Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	6,54%	6,31%	6,38%	6,31%	381,30%	6,38%	98%	BPPKBPA
1	11	22		Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak								
				Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak	3 kebijakan		2 kebijakan		100%	2 kebijakan	67%	BPPKBPA
				Jumlah instansi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	11 instansi		11 instansi		100%	11 instansi	100%	BPPKBPA
				Jumlah Kabupaten / Kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA)	2 Kab/Kota		1 Kab/Kota		100%	1 kab/kota	50%	BPPKBPA
1	11	23		Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga								
				Jumlah kebijakan keluarga berencana dan pemberdayaan	1 kebijakan		1 kebijakan		100%	1 kebijakan	100%	BPPKBPA
				Tingkat prevalensi peserta KB aktif	78,76%	78,72%	78,73%	78,72%	100%	78,73%	100%	BPPKBPA
				Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	10,69%	12,69%	12,19%	12,69%	100%	12,19%	114%	BPPKBPA
13	01			URUSAN WAJIB								
				BIDANG SOSIAL								
13	01	26		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial								
				Persentase pmks penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan perlindungan dan jasmani sosial			550 orang			550 orang	7%	Dinkesos
				Persentase desa yang di intervensi program			10,3%			10,3%		Dinkesos
				Persentase kelurahan yang 10%			10			10%		Dinkesos



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				intervensi program								
13	01	27		Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan								
				Persentase PMKS penerima manfaat yang dilayani dan diberdayakan								Dinkesos
				Persentase PSKS yang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial								Dinkesos
				Persentase desa yang di intervensi program								Dinkesos
				persentase kelurahan yang di intervensi program								
13	01	27		Program Rehabilitasi Sosial								
				Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial	7,375 orang		1,475 orang			1,475 orang		Dinkesos
				Persentase desa yang di intervensi program			6,7%			6,7%	-	Dinkesos
				Persentase kelurahan yang di intervensi program			6			6%		Dinkesos
X1	X2			URUSAN WAJIB								
				KETENAGAKERJAAN								
	2	14	1	Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja								
				Jumlah tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing			60			60		DISNAKERTANS
				Jumlah peserta pemagangan Perusahaan.			100			100		DISNAKERTANS
				Jumlah peserta pemagangan Dalam dan Luar Negeri.			50			50		DISNAKERTANS
				Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan berbasis kompetensi	1000 orang		200 orang			200 orang	20%	DISNAKERTANS
				Pelatihan Kewirausahaan Produktif Bagi Wirausaha Baru (pasca lulusan pelatihan BLK)	800 orang		160 orang			160 orang	18,73%	DISNAKERTANS
				Pelatihan Peningkatan Produktivitas	700 orang		140 orang			140 orang	20%	DISNAKERTANS



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				Tenaga Kerja								ANS
				Pembinaan Desa Produktif	35 desa		7 desa 140 org			7 desa 140 org	100,00%	DISNAKERTR ANS
2	14	2		Program Peningkatan Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja								
				Jumlah tenaga kerja mandiri sektor informal di pedesaan dan perkotaan	750 orang		150 orang			150 orang	20,00%	DISNAKERTR ANS
				Jumlah padat karya produktif dan instruktur di pedesaan dan perkotaan	750 orang		150 orang			150 orang	20,00%	DISNAKERTR ANS
				Jumlah masyarakat pedesaan dan perkotaan yang melaksanakan terapan teknologi tepat guna	750 orang		150 orang			150 orang	20,00%	DISNAKERTR ANS
				Pemberdayaan pendampingan tenaga kerja mandiri dan kerja sama antar lembaga	100 orang		20 orang			20 orang	20,00%	DISNAKERTR ANS
2	14	3		Program Pengembangan HI dan Jamsostek								
				Jumlah PP yang disahkan	660 PP		105 PP			105 PP	15,91%	DISNAKERTR ANS
				Jumlah perjanjian kerja bersama (PKB) yang terdaftar	554 PKB		105 PKB			105 PKB	18,95%	DISNAKERTR ANS
				Jumlah perusahaan yang menerapkan kesetaraan di tempat kerja	765 Prshn		105 Prshn			105 PKB	13,89%	DISNAKERTR ANS
				Jumlah pembentukan lembaga kerjasama (LKS) rintarip diperusahaan	475 Prshn		90 Prshn			90 Prshn	18,95%	DISNAKERTR ANS
				Jumlah Pembinaan lembaga kerjasama (LKS) tripartit di kab/kota	7 kab/kot		7 kab/kota			7 kab/kota	100,00%	DISNAKERTR ANS
				Rasio penyelesaian perselisihan HI di luar Pengadilan HI terhadap jumlah kasus dalam bentuk perjanjian bersama	75%		75%			75	100,00%	DISNAKERTR ANS
				Jumlah TK yang bekerja dalam hubungan kerja (LHK) yang menjadi peserta jamsostek	50,356 Tk		350 TK			350 Tk	0,70%	DISNAKERTR ANS
				Jumlah TK luar hubungan kerja (LHK) yang menjadi peserta jamsostek	1000 Tk		200 Tk			200 Tk	20,00%	DISNAKERTR ANS
				Perusahaan yang menerapkan pengupahan berdasarkan perundingan dan/atau penerapan struktur dan skala upah	865 Prshn		35 Prshn			35 Prshn	4,05%	DISNAKERTR ANS



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
2 14 4	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sitem Pengawasan Ketenagakerjaan											
				Jumlah pekerja anak yang ditarik BPTA	500 anak		100 anak			100 anak	20,00%	DISNAKERTR ANS
				Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak	50%		10%			10	50,00%	DISNAKERTR ANS
				Kerjasama penerapan norma kerja perempuan dan anak	50%		naik 10%			naik 10%	20,00%	DISNAKERTR ANS
				Perusahaan yang melaksanakan aturan waktu kerja, waktu istirahat dan pengupahan	55%		naik 10%			naik 10%	18,18%	DISNAKERTR ANS
				Perusahaan yang melaksanakan aturan penempatan dan pelatihan tenaga kerja	50%		naik 10%			naik 10%	20,00%	DISNAKERTR ANS
				perusahaan yang melaksanakan aturan hubungan kerja dan kebebasan berserikat	70%		naik 10%			naik 10%	14,29%	DISNAKERTR ANS
				Pekerja yang memperoleh hak jaminan sosial tenaga kerja (jkk dan jkk)	100%		naik 10%			naik 10%	10,00%	DISNAKERTR ANS
				Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3	60%		naik 10%			naik 10%	16,67%	DISNAKERTR ANS
				Jumlah perusahaan yang menerapkan norma mekanik, uap, berjana tekan, listrik, konstruksi bangunan dan penanggulangan kebakaran	50%		naik 10%			naik 10%	20,00%	DISNAKERTR ANS
				Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja, lingkungan kerja dan bahan berbahaya	70%		naik 10%			naik 10%	14,29%	DISNAKERTR ANS
				Kualitas teknis pemeriksa norma ketenagakerjaan	85%		naik 10%			naik 10%	11,76%	DISNAKERTR ANS
				Kerjasama lembaga penegakan hukum ketenagakerjaan	100%		naik 10%			naik 10%	10,00%	DISNAKERTR ANS
2 14 5	Program Revitalisasi Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)			Persentase instrastruktur yang terbangun	100%		19			19	19%	DISNAKERTR ANS
2 14 6	Program Perencanaan Tenaga Kerja											
				Persentase kesesuaian dokumen perencanaan tenaga kerja dengan dokumen RKPD	95%		70%			70	70%	DISNAKERTR ANS
0 2	URUSAN WAJIB											
2 4	PENATAAN RUANG											



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
1	2	4	1	Program Perencanaan Tata Ruang	Terencananya tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan	Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterpian unt review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj, Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL		3 RDTR KSP			1 RDTR KSP & 2R Semua KSP	100%	BAPPEDA
1	2	4	2	Program Pemanfaatan Ruang	Termanfaatkannya ruang sesuai peruntukkannya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat	1		Sinkronisasi Peta Citra Satlit QuickBird zona darat dan laut			Sinkronisasi Peta Citra Satlit QuickBird zona darat dan laut	100%	BAPPEDA
1	2	4	3	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terkendalinya pemanfaatan ruang di Prov. Kep. Bangka Belitung	40 PPNS Prov/Kab/Kota dan 5 Laporan Penyelenggaraan PR, Peralatan pendukung PPNS dan 30 Kasus per Kab/Kota		Alat peralatan pendukung PPNS dan 1 Laporan Penyelenggara an PR			Alat peralatan pendukung PPNS dan 1 Laporan Penyelenggar aan PR	100%	BAPPEDA
0	10			URUSAN WAJIB									
				BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
1	06	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah									
					a). Tersedianya Perda/Pergub mengenai laporan penyelenggaraan rencana pembangunan daerah dalam lingkup SKPD Provinsi	1 Perda/Pergub terkait Pelaporan Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Daerah	1 Perda/Pergub	1 Perda/Pergub	1 Perda/Pergub				BAPPEDA
					b). Tersedianya Sistem Pelaporan penyelenggaraan rencana pembangunan daerah berbasis IT pada beberaoo sektor	Tersedianya Sistem Pelaporan berbasis e-							



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				pelaporan turunan dari PP Nomor 8 Tahun 2008	government terhadap pelaporan penyelenggaraan Rencana Kerja Pembangunan Daerah							
				c). Meningkatnya kualitas Pelaporan atas Evaluasi/Pemutakhiran Sistem pelaporan penyelenggaraan rencana pembangunan daerah yang disesuaikan dengan Dokumen Perencanaan	Selarasnya instrumen Evaluasi Pelaporan dengan Dokumen Perencanaan yang baru							
1	06	16		Program Kerjasama Pembangunan								
				-	kuantitas kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah (provinsi / kabupaten / kota), badan usaha dan swasta	2 (dua) kerjasama	2 (dua) kerjasama	2 (dua) kerjasama		penetapan kebijakan terkait dengan kerjasama dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100%	BAPPEDA
1	06	18		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh								
				Kebijakan terkait dengan wilayah strategis dan cepat tumbuh	data dan kebijakan wilayah strategis dan cepat tumbuh		Penyesuaian terhadap kebijakan pusat terkait dengan kawasan strategis dan cepat tumbuh			Penyesuaian terhadap kebijakan pusat terkait dengan kawasan strategis dan cepat tumbuh	100%	BAPPEDA
				Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Perda RTRW dan Perda RTR Kawasan Strategis	1(satu) Perda RTR	Perda RTR Kawasan Strategis	1(satu) Perda RTR		Perda RTR Kawasan Strategis	100%	BAPPEDA
1	06	20		Program Penguatan Kapasitas								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah								
				Jumlah kebijakan bidang perekonomian			23					BAPPEDA
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	22 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	4 dokumen		5 dokumen	22,73%	BAPPEDA
1	06	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi								
				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	23 dokumen	5 dokumen	6 dokumen	5 dokumen		6 dokumen	26,09%	BAPPEDA
	06	23		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	5 dokumen	3 dokumen	5 dokumen	3 dokumen	5 dokumen	100%	BAPPEDA
2	20			URUSAN WAJIB								
				BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN								
2	20	27		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana								
				Persentase BPBP Kab/Kota yang Terbentuk	100%		56%			56%	56%	BPBD
				Persentase Daerah Rawan Bencana Yang di interpsi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan	100%		100%			100%	100%	BPBD
2	20	28		Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat								
				Rasio Logistik dengan jumlah korban bencana	100%		100%			100%	100%	BPBD
				Rasio peralatan dengan daerah rawan bencana	100%		75%			75%	75%	BPBD
				Rasio Relawan dengan jumlah penduduk di daerah rawan bencana	75%		40%			40%	53%	BPBD
2	20	29		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana								
				Persentase Kab/kota yang terlibat dalam Rehab rekon	50%		20%			30%	60%	BPBD



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				Rasio rehab rekon dengan jumlah korban bencana	70%		30%			40%	57%	BPBD
1	15			URUSAN WAJIB								
				BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH								
1	15	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif								Dinas KUMKM
				Bertambahnya Jumlah Sertifikat halal bagi UMKM								
1	15	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah ragam kemasan KUMKM		2 jenis			2 jenis		Dinas KUMKM
				Meningkatnya jumlah usaha menengah, kecil dan mikro								
1	15	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah								Dinas KUMKM
				Jumlah kredit Perbankan kepada UMKM, Dana BUMN/CSR, Dana Bantuan Hibah Pemerintah, dan Dana LPDB tersalurkan	Kredit Perbankan=2,60T . dana BUMN/CSR=28M, Daba Pemerintah=70M, dana LPDB=2M		kredit perbankan=2,4 0T, dana BUMN/ CSR=26M, Daba pemerintah=69 M, dana LPDB=2M			kredit perbankan=2, 40T, dana BUMN/ CSR=26M, Daba pemerintah=6 9M, dana LPDB=2M	100%	
				Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Perbankan, Lembaga Penjamim Kredit, dan BUMN	Lembaga perbankan=8, lembaga penjamin kredit=1, BUMN=14, 20 Pasar		Lembaga perbankan=1, lembaga penjamin kredit=0, BUMN=3			Lembaga perbankan=1, lembaga penjamin kredit=0, BUMN=3	100%	
				Jumlah pasar Tradisional yang dibangun melalui koperasi yang tersebar di 7 Kabupaten/kota	20 Pasar		4 pasar			4 pasar	20%	
				Jumlah OVOP UMKM	12		2			2	17%	
2	15	8		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan								Dinas KUMKM



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				UMKM (KUMKM)								
1	15	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi & UMKM (KUMKM)	Balai Latihan Koperasi dan UMKM (unit)	DED Balatkop						Dinas KUMKM
					Gedung Promosi dan Bisnis UMKM dan Koperasi	1 unit gedung promosi dan bisnis	1 unit gedung promosi dan bisnis			1 unit gedung promosi dan bisnis	100%	
					jumlah Koperasi (Pedesaan dan Perkotaan) dan UMKM	Pedesaan = 375, Perkotaan = 678	Pedesaan = 14, perkotaan = 7			Pedesaan = 14, perkotaan = 7	100%	
					Persentase Koperasi menangani Perikanan, Perkebunan, Pariwisata, Perdagangan, dan Pangan	Perikanan=32%, Perkebunan=48%, Pariwisata=7%, Perdagangan=23 6%, Pangan=85%	Perikanan=2%, perkebunan=4 %, pariwisata=1%, perdagangan=6%, pangan=5%			Perikanan=2 %, perkebunan=4 %, pariwisata=1 %, perdagangan = 6%, pangan=5%	100%	
					Persentase koperasi aktif	80%	79%			79%	99%	
					Jumlah produk yang memperoleh sertifikat halal	25 produk	5 produk			5 produk	20%	
2	15	7		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan								Dinas KUMKM
					Pelaksanaan RAT Koperasi Minimal 60%		12%			12%	100%	
1	15	19		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Jumlah SDM Koperasi dan SDM KUMKM yang terlatih	103.837 orang	400 org			jk	0%	Dinas KUMKM
16	02			URUSAN WAJIB								
				BIDANG PENANAMAN MODAL DAERAH								
16	02	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	terselenggaranya promosi potensi daerah dan terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat provinsi dan pengusaha nasional dan asing	Terpromosikan potensi unggulan daerah untuk menarik minat investor	6 kali pameran promosi di dalam dan luar negeri			6 kali pameran promosi di dalam dan luar negeri	100%	BPPTPM
16	02	16		Program Peningkatan Iklim Investasi	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	10 laporan kegiatan	10 laporan kegiatan			10 laporan kegiatan	100%	BPPTPM



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				kepada masyarakat dunia usaha	penanaman modal dan terselesaikan 5 permasalahan penanaman modal		penanaman modal dan terselesaikan 3 permasalahan penanaman modal			penanaman modal dan terselesaikan 3 permasalahan penanaman modal		
16	02	17		Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana	Tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan daerah		5 sektor usaha unggulan			5 sektor usaha unggulan	100%	BPPTPM
16	02	18		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	terwujudnya pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimum yang transparan, mudah dan cepat		45 standar operasional prosedur			48 standar operasional prosedur	80%	BPPTPM
				URUSAN PILIHAN								
				PARIWISATA								
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata								
				1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB								DISBUDPAR
				2. Jumlah wisatawan mancanegara ke daerah (ribu orang/wisman)								DISBUDPAR
				3. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara								DISBUDPAR
				4. Jumlah kegiatan promosi luar negeri								DISBUDPAR
				5. Jumlah kegiatan promosi dalam negeri								DISBUDPAR
				6. Jumlah transaksi pelaksanaan promosi pariwisata daerah di dalam negeri								DISBUDPAR
				7. Jumlah transaksi pelaksanaan promosi pariwisata daerah di pasar luar negeri								DISBUDPAR
				8. Produktivitas investasi pemasaran luar negeri								DISBUDPAR
				9. Produktivitas investasi pemasaran dalam negeri								DISBUDPAR
				10. Jumlah daerah yang dipromosikan sebagai daerah tujuan wisata KIE dan								DISBUDPAR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				minat khusus								
				11. Jumlah publikasi dan pencitraan pariwisata daerah								DISBUDPAR
				12. Jumlah peserta Widyawisata Pengenalan (Familiarization Trip)								DISBUDPAR
3	2	2		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata								
				Jumlah desa sebagai desa wisata (Destinasi)	95		70			70	74%	DISBUDPAR
				Persentase Peningkatan Penyediaan Sarana Prasarana pendukung pariwisata	75%		65%			65%	87%	DISBUDPAR
3	2	3		Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata								
				Persentase Kemitraan dengan pelaku wisata								DISBUDPAR
				Jumlah SDM Desa yang menjadi tenaga kerja di sektor Pariwisata								DISBUDPAR
				1. Jumlah peserta pelatihan manajemen dan teknis								DISBUDPAR
				2. Jumlah SDM yang kompetensinya meningkat/bersertifikasi								DISBUDPAR
				3. Jumlah partisipasi kegiatan forum kerjasama dan implementasinya								DISBUDPAR
3	2	4		Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya								
				1. Kontribusi sektor EKSB terhadap PDRB								DISBUDPAR
				2. Tingkat Partisipasi tenaga kerja EKSB								DISBUDPAR
				3. Kontribusi jumlah usaha sektor EKSB terhadap daerah								DISBUDPAR
				4. Jumlah karya kreatif yang difasilitasi pendaftaran HKI bagi karya kreatif								DISBUDPAR
				5. Jumlah pengembangan ruang kreatif								DISBUDPAR
				6. Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan jejaring								DISBUDPAR
				7. Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan akses pasar								DISBUDPAR
				8. Jumlah pelaku kreatif EKSB yang mengalami peningkatan kemampuan								DISBUDPAR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				kreasi dan produksi karya kreatif								
				9. Jumlah SDM yang difasilitasi untuk meningkatkan kemampuan kerja dan pengetahuan kerja dan pengetahuan terkait EKSB								DISBUDPAR
3	2	5		Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK								
				1. Kontribusi sektor EMDI terhadap PDRB								DISBUDPAR
				2. Tingkat Partisipasi tenaga kerja EKMDI								DISBUDPAR
				3. Kontribusi jumlah usaha sektor EKMDI terhadap daerah								DISBUDPAR
				4. Jumlah karya kreatif yang difasilitasi pendaftaran HKI bagi karya kreatif								DISBUDPAR
				5. Jumlah pengembangan ruang kreatif								DISBUDPAR
				6. Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang mengalami peningkatan jejaring								DISBUDPAR
				7. Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang mengalami peningkatan akses pasar								DISBUDPAR
				8. Jumlah pelaku kreatif EKMDI yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif								DISBUDPAR
				9. Jumlah kerjasama pengembangan dan pemanfaatan lisensi teknologi								DISBUDPAR
				10. Jumlah pusat kreatif yang terbentuk atau direvitalisasi								DISBUDPAR
				URUSAN WAJIB								
				KEBUDAYAAN								
2	17	1		Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	Persentase budaya yang dilestarikan							DISBUDPAR
2	17	2		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase budaya yang dilestarikan	80% kekayaan budaya telah terkelola dengan baik	70%			70%	88%	DISBUDPAR
2	17	3		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase budaya yang dilestarikan							DISBUDPAR
2	17	4		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kemitraan dengan pelaku budaya							DISBUDPAR
2	17	5		Program Pelestarian Cagar Budaya	Persentase cagar budaya dan museum							DISBUDPAR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				dan Pemuseuman	yang dilestarikan							
					Persentase pengunjung pada museum							
2	17	6		Program Pembinaan Seni dan Perfilman	Persentase hasil karya seni dan perfilman							DISBUDPAR
2	17	7		Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya								DISBUDPAR
2	17	8		Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya	Persentase pemberdayaan komunikasi pemerhati sejarah dan budaya							DISBUDPAR
18	01			URUSAN WAJIB								
				PEMUDA DAN OLAHRAGA								
18	01	16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda	1428 pemuda	287 pemuda			287 pemuda	20%	Dispora
18	01	17		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/keterampilan	370 pemuda	74 pemuda			74 pemuda	20%	Dispora
18	01	18		Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba	250 pemuda	50 pemuda			50 pemuda	20%	Dispora
18	01	19		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah Rakor dan Workshop Olahraga	15 kali	3 kali			3 kali	20%	Dispora
18	01	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga								
					Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA, Kejurda, POPWIL, POPNAS, POPCANAS, Olahraga Rekreasi, SKJ dan HAORNAS)	28 even	6 even (POPNAS, POPCANAS, Rekreasi, SKJ, Kejurda dan HAORNAS)			6 even (POPNAS, POPCANAS, Rekreasi, SKJ, Kejurda dan HAORNAS)	100%	Dispora
					Jumlah atlet dan pelatih yang dibina	333 orang	70 orang			70 orang	21%	Dispora
18	01	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana prasarana (gedung) olahraga yang dibangun di sport center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11 Sarpras	2 Sarpras : Lapangan Tembak dan Lapangan Tennis			2 Sarpras : Lapangan Tembak dan Lapangan Tennis	100%	Dispora
18	01	22		Program Pembinaan Generasi Muda								
					Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan pembinaan generasi muda	160 pemuda	32 pemuda			32 pemuda	20%	Dispora
					Terselenggaranya pelaksanaan paskibra tingkat Provinsi Kepulauan	5 kali	1 kali			1 kali	20%	Dispora



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				Bangka Belitung								
1.1 9	01			URUSAN RUTIN								
				BIDANG KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI								
2	19	1		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan								Kesbanglinmas
					persentase desa yang diinterpendi dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (dari jumlah total desa)		30%			30%	100%	
1.1 9	16			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal								Kesbanglinmas
					Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan poskamling (dari jumlah total desa)		30%			30%	100%	
1.1 9	17			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan							Kesbanglinmas
1.1 9	18			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan							Kesbanglinmas
				Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Menurunnya tingkat kriminalitas yang terkait dengan penyakit masyarakat							Kesbanglinmas / Pol PP
1.1 9	19			Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan								Kesbanglinmas
					Persentase kelompok pemberdayaan masyarakat yang ikut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan (dari jumlah total kelompok total)		50%			50%		
1.1 9	21			Program Pendidikan Politik Masyarakat								Kesbanglinmas
					Persentase Kelompok masyarakat yang ikut dalam politik (Dari jumlah total kelompok)		30%			30%	100%	
				Program Kemitraan Kamtibmas								Kesbanglinmas
					Persentase kemitraan yang dilaksanakan dalam kamtibmas		50%			60%	100%	
				Program Ketahanan Ekonomi Masyarakat	Terciptanya Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah							Kesbanglinmas
2	20			URUSAN WAJIB								



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN									
2	20	1		Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat daerah									
					Terwujudnya peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu			Terlaksananya movev persiapan Pemilu DPRD, terlaksananya verifikasi dan terbitnya SK Gubernur tentang peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota dan terlaksananya verifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD			Terlaksananya verifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD	100%	Biro Pemerintahan
2	20	2		Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah									
					Terwujudnya Peningkatan pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Terlaksananya fasilitasi pelantikan 4 Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan terwujudnya			Terlaksananya fasilitasi pelantikan 4 Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan terwujudnya	100%	Biro Pemerintahan



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
								monev persiapan Pilkada 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			monev persiapan Pilkada 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
2	20	3		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
					Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	-Terciptanya aturan dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diserahkan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Desa/Kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang pelaksanaan tugas pembantuan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tertibnya penyampaian laporan		Terlaksananya pelaksanaan TP di 3 Kab/Kota serta peningkatan kualitas SDM sebanyak 100 orang dan terlaksananya pembinaan dan monitoring laporan pelaksanaan keuangan di provinsi dan 7 Kab/Kota			Terlaksananya pelaksanaan TP di 3 Kab/Kota serta peningkatan kualitas SDM sebanyak 100 orang dan terlaksananya pembinaan dan monitoring laporan pelaksanaan keuangan di provinsi dan 7 Kab/Kota	100%	Biro Pemerintahan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
					pelaksanaan keuangan di daerah							
				Terwujudnya Peningkatan pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					Terlaksananya fasilitasi pelantikan 4 Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan terwujudnya monev persiapan Pilkada 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100%	Biro Pemerintahan
					-Terlaksananya rapat evaluasi dan monitoring serta terwujudnya kelancaran pengiriman laporan keuangan daerah, terwujudnya koordinasi yang baik dengan aparat instansi terkait dan tercapainya peningkatan pengembangan sumber pendapatan desa, inventarisasi		-Terlaksananya satu kali rapat evaluasi dan tiga kali monitoring 7 kabupaten/kota, terlaksananya dua kali rapat koordinasi dan meningkatnya pemahaman 80 peserta dalam hal pengembangan sumber pendapatan desa, inventarisasi kekayaan desa			Terlaksananya satu kali rapat evaluasi dan tiga kali monitoring 7 kabupaten/kota, terlaksananya dua kali rapat koordinasi dan meningkatnya pemahaman 80 peserta dalam hal pengembangan sumber pendapatan		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
					kekayaan des dan pungutan desa, terlaksananya kegiatan sosialisasi pengembangan sumber pendapatan daerah serta meningkatnya kualitas SDM pengelola keuangan daerah		dan pungutan desa, terwujudnya peningkatan kualitas SDM 40 peserta dan meningkatnya pengembangan sumber pendapatan daerah yang potensi secara optimal, tersedianya 100 buku data base sumber pendapatan desa, kekayaan			desa, inventarisasi kekayaan desa dan pungutan desa, terwujudnya peningkatan kualitas SDM 50 peserta dan meningkatnya pengembangan sumber pendapatan daerah yang potensi secara optimal, tersedianya 100 buku data base sumber pendapatan desa, kekayaan		
2	20	4		Prog. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
				Jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai minimal dengan kategori baik (B)	41 SKPD		7 SKPD			7 SKPD	17%	Inspektorat, Biro Organisasi
2	20	6		Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi								
				Tertatanya dan sempurnanya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			LAKIP (Nilai B)			LAKIP (Nilai C)	10%	Biro Organisasi, Inspektorat,
2	20	8		Program Peningkatan Kerjasama antar	Terwujudnya optimalisasi perencanaan,	Terwujudnya	Terpublikasinya			Terpublikasin	100%	Biro



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				Pemerintah Daerah	pelaksanaan serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah	kerjasama daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, daya saing daerah, pengelolaan daerah yang berbatasan dan penanggulangan potensi konflik antar daerah yang berbatasan	peta daerah potensi kerjasama daerah, dan terbentuknya networking kerjasama daerah antar daerah tingkat provinsi dan kab/kota			ya peta daerah potensi kerjasama daerah, dan terbentuknya networking kerjasama daerah antar daerah tingkat provinsi dan kab/kota		Pemerintahan
2	20	9		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya Penataan Peraturan Perundang-undangan							Biro Hukum
2	20	10		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terwujudnya harmonisasi penyelenggaraan otonomi daerah	Terwujudnya harmonisasi penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah di 4 kabupaten/kota serta terlaksananya sosialisasi 16 urusan wajib dan pilihan terkait dengan pelaksanaan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota			Terlaksananya a pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah di 4 kabupaten/kota serta terlaksananya sosialisasi 16 urusan wajib dan pilihan terkait dengan pelaksanaan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota	100%	Biro Pemerintahan
2	20	11		Program Pembinaan dan Pengawasan Represif terhadap Produk Hukum	Jumlah Perda Kab/Kota yang dievaluasi dan diverifikasi							Biro Hukum



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				Kab/Kota								
2	20	12		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik, serta meningkatnya pemahaman aparatur pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan terhadap peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur/SDM tersebut		Tersedianya pedoman Peraturan tentang kecamatan, desa/kelurahan, terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik, serta meningkatnya pemahaman aparatur		Tersedianya pedoman Peraturan tentang kecamatan, desa/kelurahan, terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik, serta meningkatnya pemahaman aparatur	100%	Biro Pemerintahan
2	20	13		Program pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan		42 SKPD (anjab)			42 SKPD (anjab)	100%	Biro Organisasi
2	20	14		Program peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah		42 SKPD (SOP, SPM, SP, IKM)			42 SKPD (SOP, SPM, SP, IKM)	100%	Biro Organisasi
2	20	15		Program Pelaksanaan Legislasi Daerah (Prolegda)								
					Terlaksananya Legislasi Daerah dengan baik dan lancar	61 Perda	12 Perda			12 Perda	19%	Biro Hukum
2	20	16		Program Bantuan Hukum	Jumlah bantuan hukum yang diberikan kepada aparatur/masyarakat							Biro Hukum
2	20	17		Program Pelaksanaan Jaringan	Jumlah Perda/Perqub yang terkait dengan							Biro Hukum



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	pelayanan publik							
2	20	18		Program Penataan dan Dokumentasi Hukum	Jumlah Perda/Pergub yang sudah ditata dan didokumentasikan							Biro Hukum
2	20	19		Program Sosialisasi Hukum dan Produk Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi Penyuluhan Hukum/Perundang-undangan yang dilakukan							Biro Hukum
2	20	20		Program Penataan di bidang Administrasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Naskah Akademik yang disusun/dibuat							Biro Hukum
2	20	21		Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kepala daerah	Terwujudnya kinerja pelaporan Kepala Daerah dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang sistem pelaporan Kepala Daerah	Tersusunnya pelaporan Kepala Daerah yang akuntabel dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang sistem pelaporan Kepala Daerah			Tersusunnya pelaporan Kepala Daerah yang akuntabel dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang sistem pelaporan Kepala Daerah	100%	Biro Pemerintahan
2	20	22		Program penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Meningkatnya rasionalitas struktur dan kapasitas kelembagaan SKPD		23 UPTD			23 UPTD	100%	Biro Organisasi
2	20	23		Program pengembangan koordinasi dan sinkronisasi penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara Pemprov dan pemkab/kota dalam penataan kelembagaan SKPD		1 Kab			1 Kab	100%	Biro Organisasi
2	20	24		Program penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Tertatanya manajemen pengelolaan SKPD		23 UPTD			23 UPTD	100%	Biro Organisasi



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
2	20	32		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								
2	20			URUSAN WAJIB								
				BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN								
2	20	2		Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah								
				peningkatan fasilitasi pelayanan pemerintahan hubungan antar lembaga. (mess daerah, promosi dan informasi)	5 kali acara halal bihalal		1 kali acara halal bihalal			1 kali acara halal bihalal	100%	Kantor Perwakilan Bangka Belitung
1	21			URUSAN WAJIB								
				URUSAN WAJIB								
				SOSIAL								
2	13	4		Program Pembinaan Generasi Muda	Jumlah Pemuda yang mengikuti bimbingan teknis kepemudaan	520	428			456	88%	Biro Kesra
2	13	5		Program Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama								Biro Kesra
2	13	6		Program Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan sosial	Jumlah Lembaga Keagamaan dan sosial di Prov Kep Babel							Biro Kesra
2	13	7		Program Bantuan terhadap tempat-tempat ibadah	Persentase sarana ibadah yang dibantu terhadap jumlah proposal	90%	70%			75%	83%	Biro Kesra
2	13	8		Program Pembinaan Mental, Akhlak dan Etika	Persentase pembinaan Mental, Akhlak dan Etika Aparatur	90%	70%			75%	83%	Biro Kesra
2	13	9		Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Persentase pembinaan terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama	90%	70%			75%	83%	Biro Kesra
2	13	10		Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah lembaga adat dan Sanggar Seni	60	12			12	20%	Biro Kesra
2	20			URUSAN WAJIB								
				BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				PERSANDIAN								
2	20	1		Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat daerah								
				Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	30 Diklat		6 Diklat			6 Diklat	199%	Sekretariat DPRD
				Lamanya proses pembahasan Perda/Perqub			3 Bulan			3 Bulan	100%	Sekretariat DPRD
				Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah								Sekretariat DPRD
2	20			URUSAN WAJIB								
				BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN								
2	20	4		Prog. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
				jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah								Inspektorat, Satpol PP
				jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung yang selesai ditindaklanjuti	4.659 Rekomendasi		220 Rekomendasi			220 Rekomendasi	5%	Inspektorat, Satpol PP
				Jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai minimal dengan kategori baik (B)	41 SKPD		7 SKPD			7 SKPD	17%	Inspektorat, Biro Organisasi
2	20	5		Prog. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan								
				Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikasi penjejaan jabatan fungsional Auditor (JFA) dan pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan								Inspektorat, Badan Diklat, BKD



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				daerah (P2UPD) serta jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat teknis lainnya								
				a. Pegawai sudah sertifikasi penjejjangan JFA/P2UPD	84 orang		8 orang			8 orang	10%	Inspektorat, Badan Diklat, BKD
				b. Pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat	277 orang		48 orang			48 orang	17%	
				Terwujudnya Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan								
2	20	6		Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi								
				adanya kebijakan sistem dan prosedur yang dapat menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi pengawasan	2 sistem		0 Sistem			0 Sistem	0%	Inspektorat
				Tertatanya dan sempurnanya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			LAKIP (Nilai B)			LAKIP (Nilai C)	10%	Biro Organisasi, Inspektorat,
2	20	7		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	27 kasus		5 kasus			5 kasus	19%	Inspektorat
2	20			URUSAN WAJIB								
				BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN								
2	20	30		Program Pendidikan Kedinasan	275		55			55	20%	Badan Diklat/BKD
2	20	31		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
				Meingkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur								Badan Diklat/BKD
				Persentase pegawai yang menduduki jabatan karier yang sudah didiklatkan								Badan Diklat/BKD
2	20	32		Program Pembinaan dan								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				Pengembangan Aparatur								
				Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	85		1					BKD
				Terlaksananya penempatan dan promosi pegawai melalui proses Assesment Center	100%		60%					BKD
				Terwujudnya kebijakan tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja (berdasarkan job grading)	100%		0					BKD
				BIDANG KETAHANAN PANGAN								
1	21	15		Program Peningkatan Ketahanan Pangan								Badan Ketahanan Pangan
				Persentase cadangan pangan pemerintah	100%		100%			100%	100%	
				Skor pola pangan harapan	95		90,3			90,3	95%	
				Jumlah komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi di Babel	253		50			50	20%	
				Meningkatkan ketersediaan informasi, pasokan harga, distribusi dan akses pangan 14 komoditi bahan pangan pokok (%)	95%		85%			0,8	84%	
				Jumlah pembentukan desa mandiri pangan sebanyak 3 desa per tahun	15 desa		3 desa			3 desa	20%	
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di daerah rawan pangan (jumlah desa)	75 desa		3			3	4%	
2	22			URUSAN WAJIB								
				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								
2	22	1		Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa								
				Persentase BUMDes yang aktif	100%		70%			70%	70%	BPMD
				Jumlah pasar desa yang aktif	50 desa		15 desa			15 desa	30%	BPMD
				PKK aktif (Jumlah seluruh PKK)	100%		90%			90%	90%	BPMD
				Posyandu aktif (Jumlah seluruh posyandu)	100%		95%			95%	95%	BPMD
				Persentase lembaga keuangan mikro perdesaan/usaha ekonomi produktif yang	90%		75%			75%	83%	BPMD



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				berfungsi (jumlah keseluruhan desa)								
				Prosentase pasar desa yang aktif	100%		70%			70%	70%	BPMD
2	22	2		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/kelurahan dan Keuangan Desa/kelurahan								
				Persentase desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan yang mengaplikasikannya (Jumlah seluruh Desa/kelurahan)	90%		45%			45%	50%	BPMD
				Persentase desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan asset desa atau kelurahan yang mengaplikasikannya (Jumlah seluruh Desa/kelurahan)			100%			100%	100%	BPMD
2	22	3		Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan								BPMD
				Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif (Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan)	100%		75%			75%	75%	
				Rasio Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan jumlah penduduk desa/kelurahan (1 desa/20 Kelompok pemberdayaan..kondisi skr 6 kelompok))	0,6%		0,40%			0,40%	66,67%	
2	22	5		Program Pengelolaan SDA Desa/kelurahan dan Pengembangan TTG								
				Persentase posyantek yang berfungsi (Jumlah seluruh Kecamatan)	100%		70%			70%	70%	BPMD
				Persentase desa yang mengembangkan energy terbarukan (jumlah seluruh desa)	100%		60%			60%	60%	BPMD
				Prosentase jumlah desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG	55%		40%			40%	73%	BPMD
#	22	6		Program Beras Miskin Gratis (Raskintis)	Persentase rumah tangga miskin yang mendapat raskintis (Jumlah seluruh keluarga miskin)	100%	100%			100%	100%	BPMD
X1				URUSAN WAJIB								
				BIDANG PERPUSTAKAAN								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
1	1.26	15			Program Perbaikan Sistem Administasi Kearsipan								
					Persentase Sistem Kearsipan yang diterapkan								BPAD
1	1.26	16			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokument/Arsip Daerah								
					Persentase dokumen arsip yang berhasil diselamatkan								BPAD
1	1.26	17			Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan								
					Persentase jumlah sarana dan prasarana kearsipan								BPAD
1	1.26	18			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi								
					Meningkatkan apresiasi aparaturnya dan masyarakat terhadap kearsipan serta peningkatan sarana kearsipan bagi pemerintahan desa/kelurahan	180 desa/kelurahan		40 desa/kelurahan			40 desa/kelurahan	22%	BPAD
1	1.26	21			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								
					Persentase desa/kelurahan yang diinterpendensi pengembangan budaya baca	592 Desa		120 Desa			115 Desa	19%	BPAD
					Jumlah Desa/kelurahan yang dikembangkan perpustakaan desa/kelurahan	105 Desa/Kel		21 Desa/Kel			21 Desa/Kel	20%	BPAD
					Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina	680 Org		160 Org			160 Org	24%	BPAD
					Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan								
					Jumlah Aparatur yang dibina dan dikembangkan dalam pemahaman kearsipan	680 org		160 org			160 org	24%	BPAD
					Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan								
					Persentase sistem kearsipan yang diterapkan								BPAD
2					URUSAN WAJIB								
2	25				BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
2	25	1		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa								
				Terpenuhnya infrastruktur dan komunikasi dan infomatika di tujuh Kab/Kota		-	-	-				DISKOMINFO
2	25	2		Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi								
				Tersedia panduan jangka panjang Percepatan Pengembangan E-Gov Provinsi Kep. Babel								DISKOMINFO
				Tersedianya SOP bagi SKPD dalam pengelolaan TI								DISKOMINFO
				Tersedianya SDM Aparatur Pemerintah yang terlatih sebanyak 50 instansi provinsi/kab/kota								DISKOMINFO
				Terselenggaranya Rakor Komunikasi dan Informatika								DISKOMINFO
				Tersedianya data Monev Kab/Kota								DISKOMINFO
				Terlaksananya Bimtek Kajian Bidang Pos dan Telekomunikasi								DISKOMINFO
2	25	3		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika								
				Terwujudnya peningkatan SDM Komunikasi dan Informatika								DISKOMINFO
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Postel melalui Bimtek dan Pelatihan								DISKOMINFO
				Jumlah Tenaga Teknis Profesional Bidang Pos dan Jasa Titipan								DISKOMINFO
				Terwujudnya PNS yang berkualifikasi sandi da kamar sandi representatif dalam rangk aptimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi persandian								DISKOMINFO
2	25	4		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media								
				Tersedianya Majalah Kominfo Prov.								DISKOMINFO
				Terpublikasinya kegiatan pembangunan daerah melalui konfrensi pers								DISKOMINFO
				Terjaganya kelestarian budaya/tradisi								DISKOMINFO



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				masyarakat lokal melalui Pekan Informasi								
2	25	5		Program Optimalisasi Pemanfaat Teknologi Informasi								DISKOMINFO
2	25	6		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat								DISKOMINFO
2				URUSAN WAJIB PILIHAN								
2	2	2		BIDANG PERTANIAN								
2	02	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani								DISTANBUNAK
				Persentase kelompok tani yang menerima manfaat (dari jumlah total kelompok tapi miskin)		-	-	-				
2	02	17		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan								DISTANBUNAK
				Tersedianya fasilitas pemotongan hewan yang bersih dan higienis di kab/kota	Pembangunan fasilitas/sarana pemotongan hewan							
2	02	21		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak								DISTANBUNAK
				Pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan petani dan petugas	Pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan menular di Bangka Belitung		Pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan menular di Bangka Belitung			Pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan menular di Bangka Belitung	100%	
				Program Peningkatan produksi hasil peternakan								DISTANBUNAK
				Persentase kelompok ternak yang menerima manfaat (dari jumlah total kelompok ternak miskin)								
				Program Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan								DISTANBUNAK
				Tersedianya fasilitas pemotongan hewan yang bersih dan higienis di kab/kota	Pembangunan fasilitas/sarana pemotongan							



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
						hewan							
2	02	24		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan									
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan									
					Pengembangan kawasan perkebunan	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna		Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna			Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna	100%	DISTANBUNAK
					Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna pada kawasan pengembangan lada	Terwujudnya penerapan teknologi bercocok tanam lada yang ramah lingkungan		Terwujudnya penerapan teknologi bercocok tanam lada yang ramah lingkungan			Terwujudnya penerapan teknologi bercocok tanam lada yang ramah lingkungan	100%	DISTANBUNAK
				Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan									
					Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi yang memadai	Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan		Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan			Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan	100%	DISTANBUNAK
					Terbangunnya sentra pengembangan lada putih (Muntok White Pepper)	Meningkatnya kesejahteraan petani dan lada		Meningkatnya kesejahteraan petani dan lada			Meningkatnya kesejahteraan petani dan lada	100%	DISTANBUNAK
					Kawasan pengembangan integrasi perkebunan sawit - sapi	Pengembangan integrasi tanaman ternak dan lahan pertanian/perkebunan		Pengembangan integrasi tanaman ternak dan lahan pertanian/perkebunan			Pengembangan integrasi tanaman ternak dan lahan pertanian/perkebunan	100%	DISTANBUNAK
					Pengembangan gembilik	25ha		5ha			5ha	100%	DISTANBUNAK



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				Jumlah bibit unggul yang berhasil dikembangkan								DISTANBUNAK
				Persentase petani yang menerima manfaat (dari jumlah total petani miskin yang dibina)								DISTANBUNAK
				BIDANG PERTANIAN								
2	02			URUSAN WAJIB PILIHAN								
				Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha								
				Jumlah kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang dapat mengembangkan usahanya	100 kelompok		20 kelompok			20 kelompok	20%	Bakorluh
				Jumlah kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang melakukan pembelajaran dengan metode percontohan	95 kelompok		19 kelompok			19 kelompok	20%	Bakorluh
				Program Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha								
				Jumlah SDM Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	150 Penyuluh		150 Penyuluh			30 Penyuluh	20%	Bakorluh
				Jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitasnya	750 Orang		150 Orang			150 Orang	20%	Bakorluh
				Program Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan								
				Jumlah materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang tersusun dan terdistribusi dalam berbagai media cetak	30 Judul Leaflet, 15 Judul Brosur		6 judul leaflet, 3 Judul Brosur			6 judul leaflet, 3 Judul Brosur	20%	Bakorluh
				Jumlah Balai Penyuluh Pertanian/Kecamatan yang difasilitasi dan dikembangkan pada 7 kabupaten/kota se-Prov. Babel	30 unit BPP/BPK		6 unit BPP/BPK			6 unit BPP/BPK	20%	Bakorluh



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
3				URUSAN PILIHAN								
3	2			KEHUTANAN								
3	2	1		Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan								
				Jumlah kelompok usaha masyarakat sekitar kawasan hutan yang didampingi	4 kelompok		4 kelompok			4 kelompok	100%	DISHUT
				Jumlah kabupaten yang fasilitasi pembangunan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat	6 kabupaten		6 kabupaten			6 kabupaten	100%	DISHUT
3	2	2		Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat								
				Terencananya pengelolaan DAS terpadu	Tersusunnya dokumen pengelolaan DAS terpadu, sehingga terciptanya fungsi DAS dalam menampung tata air dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat di		Pengendalian pelaksanaan rencana pengelolaan DAS terpadu			Pengendalian pelaksanaan rencana pengelolaan DAS terpadu	100%	DISHUT
				Terkendalnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan	Terkendalnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan		Terkendalnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan			Terkendalnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan	100%	DISHUT
3	2	3		Program Perencanaan dan								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				Pengembangan Hutan								
				Terjaminnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal	Terjaminnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap batas kawasan hutan dan tertib penata gunaan kawasan hutan			Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap batas kawasan hutan dan tertib penata gunaan kawasan hutan	100%	DISHUT
3	2	4		Program perlindungan dan konservasi SDA								
				Meningkatnya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan	Terlaksananya penanganan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dari 10 polisi kehutanan (PNS)		Terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan			Terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan	100%	DISHUT
				Meningkatnya kapasitas lembaga pengelolaan hutan lindung, dan kepastian bentuk pengolahan kawasan hutan konservasi dalam rangka terselenggaranya pelayanan Publik kerjasama konservasi alam	Terbentuknya dan beroperasinya KPHL, kepastian bentuk pengelolaan kawasan hutan konservasi (sebagai Taman Hutan raya/taman wisata alam/cagar alam/taman buru) dalam rangka terwujudnya optimalisasi		Tersusunnya rencana pengelolaan hutan lindung Pulau Belitung			Tersusunnya rencana pengelolaan hutan lindung pulau bangka	100%	DISHUT



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
						pemanfaatan SDA dalam rangka terselenggaranya pelayanan publik dan kerjasama konservasi alam							
02	03			URUSAN PILIHAN									
				BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
02	03	15		Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan dan Energi									
					DBH Sektor Migas (milyar rupiah)	30					6.000	100%	DISTAMBEN
					DBH Sektor Tambang (milyar rupiah)	325					65.000	100%	DISTAMBEN
					Jumlah KK yang telah melakukan konversi minyak tanah ke gas (KK)	300.000							DISTAMBEN
					Jumlah SPBG (unit)	2							
02	03	16		Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan									
					Terkoordinirnya kegiatan penambangan di provinsi kepulauan bangka belitung	200 laporan	-	40 laporan	-		40 laporan	100%	DISTAMBEN
02	03	17		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan									
					PLT Hubrid 9 (sembilan) unit; PLTS Terpusat 10 (sepuluh) unit; PLS Tersebar 300 unit; PJU 1000 unit; Energi Baru Terbarukan (EBT) 5 (lima) paket; PLTU 193 MW; JTM 1.107,1 kms, JTR 1.239,9 kms; 1 (satu) laporan DED PLTMH; 1 (satu) Peraturan Gubernur	PLT Hubrid 9 (sembilan) unit; PLTS Terpusat 10 (sepuluh) unit; PLS Tersebar 300 unit; PJU 1000 unit; Energi Baru Terbarukan (EBT) 5 (lima) paket; PLTU 193 MW; JTM 1.107,1 kms, JTR 1.239,9 kms;		PLT Hybrid 2 unit; PLTS Terpusat 2 unit; PLTS Tersebar 60 unit; PJU 200 unit; EBT 1 paket; PLTU 30 MW; JTM 221,3 kms; JTR 247,8 kms			PLT Hybrid 2 unit; PLTS Terpusat 2 unit; PLTS Tersebar 60 unit; PJU 200 unit; EBT 1 paket; PLTU 30 MW; JTM 221,3 kms; JTR 247,8 kms	100%	DISTAMBEN



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
						1 (satu) laporan DED PLTMH; 1 (satu) Peraturan Gubernur							
					Jumlah dan jenis energi alternatif yang dikembangkan			97%			98%	100%	
					Jumlah desa mandiri energi	3 desa		1 desa			1 desa	100%	DISTAMBEN
					Tingkat penerapan hemat energi	32% Penghematan		27% Penghematan			27% Penghematan	100%	DISTAMBEN
					Tingkat fasilitasi investasi energi ketenagalistrikan	2 PLTU					50.000	100%	DISTAMBEN
02	03	22		Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah									
					Tersedianya laporan pelaksanaa program reklamasi dan pasca Tamban sebanyak 75 laporan. 1 PERGUB Mineral, 65 Pelaku Tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertambangan dan energi	75 laporan. 1 PERGUB Mineral, 65 Pelaku Tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertambangan dan energi		15 Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang, 13 Lap Pelaku Tambang yang dibina dan 4 kegiatan peningkatan SDM			15 Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang, 13 Lap Pelaku Tambang yang dibina dan 4 kegiatan peningkatan SDM	100%	DISTAMBEN
				Program Penyusunan Peraturan Daerah tentang Distribusi dan Penggunaan BBM Bersubsidi*)	Tersedianya Peraturan tentang Distribusi BBM tingkat provinsi	1 Perda							DISTAMBEN
				Program Peningkatan Penganekaragaman Sumber Energi Alternatif Berbasis Lokal *)	Berkembangnya energi alternatif berbasis potensi lokal	24.000		Pengembang an energi alternatif (2 unit)			Pengembang an energi alternatif (2 unit)	100%	DISTAMBEN
2.0	01			URUSAN WAJIB									
2.0	2.05			KELAUTAN DAN PERIKANAN									
2.0	2.05	01	15	Program Pengelolaan dan									



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
									Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
5					Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan								
					Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (juta Ha)	400 Ha		3.000 Ha	200 Ha		3000 Ha	100%	DKP
					Jumlah Pulau-Pulau Kecil termasuk Pulau Kecil terluar yang dikelola(pulau)	12 Pulau		10 Pulau	10 Pulau	100%	10 Pulau	100%	DKP
2.05	2.05	01	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan								
					Produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	68,581		55.710			62,046	90%	DKP
					nilai tukar pembudidayaan ikan(NTPi) Provinsi	127		122			125	98%	DKP
2.05	2.05	01	21		Program Pengembangan Perikanan Tangkap								
					Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton/tahun)	181.000	163.000	169.000			169	93%	DKP
					Nilai tukar Nelayan (NTN)	127		122			122	96%	DKP
2.05	2.05	01	26		Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan								
					Jumlah unit pengolahan ikan	2.800		2.200 unit			2200	79%	DKP
					Nilai ekspor Hasil Perikanan (USD/tahun)	24.120.000		17.370.000			17.370.000	72%	DKP
					Konsumsi Ikan(kg/kap/th)	49		47			47	96%	DKP
					Jumlah Kredit yang difasilitasi KKMB(milyar)	1,6		1,4			1,4	88%	DKP
2	07				URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN								
2	07	01	16		Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah								
					jumlah unit usaha industri kecil dan menengah sebanyak 7145 unit			7.005					Disperindag
					total nilai investasi industri kecil dan menengah(RP.Milyar)			356.001					Disperindag
2	07	01	18		Program Penataan Struktur Industri	7		1			1	14%	Disperindag
2	07	01	19		Program Pengembangan Sentra-								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target RKPD Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015		SKPD Penanggung Jawab
								Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capai Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=(5+7))*	(10=9/4)	(11)
				Sentra Industri Potensial								
				Jumlah OVOP IKM percontohan	7		2			2	29%	Disperindag
				Jumlah forum pembentukan OVOP	5		1			1	20%	Disperindag
2	07	01	20	Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)								
				Jumlah Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)	7		1			1	14%	Disperindag
				PERDAGANGAN								
2	07	01	16	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan								
				Jumlah kecamatan yang terlayani sebanyak 50 kecamatan	50		47			47	94%	Disperindag
				Retribusi Tera (Rp. Juta)	1221		242			242	20%	Disperindag
2	07	01	16	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri								
				Jumlah pedagang UMKM sebanyak 1/378 pedagang	6670		1.338			1338	20%	Disperindag
				Jumlah Pasar Percontohan sebanyak 7 unit	18,000		3			3	17%	Disperindag

2.3 Perubahan Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Kepulauan Bangka Belitung

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada penyusunan APBD tahun 2015 asumsi terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2014 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp43.169,61 milyar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 besarnya mencapai Rp13.623,48 milyar. Adapun realisasi PDRB ADHB Tahun Dasar 2010 adalah Rp56.389,85 milyar dan PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 adalah Rp44.171,62 milyar.

Memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, dimana sampai dengan triwulan I tahun 2015 terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi terutama pada beberapa lapangan usaha utama di Bangka Belitung maka dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD ini proyeksi terhadap PDRB 2015 harus dilakukan penyesuaian karena asumsi awal dianggap sudah tidak relevan lagi. Adapun proyeksi terhadap PDRB tahun 2015 berdasarkan ADHB semula diperkirakan sebesar Rp47.782,24 milyar dan ADHK 2000 sebesar Rp14.498,01 milyar, maka dengan memperhatikan perkembangan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan triwulan I tahun 2015 diperkirakan PDRB ADHB akan berada pada angka Rp45.645,17 milyar sementara itu PDRB ADHK 2010 diperkirakan sebesar Rp46.291,86 milyar.

Gambaran mengenai perbandingan antara proyeksi dan realisasi 2014 dan proyeksi 2015 dengan perubahannya dapat terlihat pada Tabel II.2.

Tabel II.2
Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi PDRB 2014 dan Proyeksi serta Perubahan PDRB 2015 (ADHB) (RpMilyar)

Lapangan Usaha	2014		2015	
	Proyeksi	Realisasi	Semula	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	8.532,54	8.451,64	9.734,13	8.857,31
2. Pertambangan & Penggalian	5.848,13	5.945,83	6.014,05	6.231,23
3. Industri Pengolahan	7.848,13	8.090,51	8.547,52	8.478,85
4. Listrik, Gas & Air Bersih	319,98	318.669,0	362,93	333,96
5. Konstruksi	3.843,42	3.870,22	4.275,66	4.055,99
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	8.127,46	8.423,48	8.875,13	8.827,80
7. Pengangkutan & Komunikasi	1.566,52	1.569,09	1.745,69	1.644,40
8. Keuangan, Real estate & Jasa Prsh	1.261,78	1.242,40	1.379,46	1.302,03
9. Jasa-Jasa	5.821,65	5.642.725	6.847,46	5.913,57
PDRB Dengan Migas	43.169,61	43.554.550	47.782,24	45.645,17

Sumber: BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Selanjutnya jika dilihat dari sisi pengeluaran, dari total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010 yang sebesar Rp56.389,85 milyar pada tahun 2014, sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga yaitu sebesar Rp29.353,47 milyar. Dan dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 yang sebesar Rp44.171,62 milyar pada tahun 2014, bagian terbesar digunakan untuk Ekspor Luar Negeri yaitu sebesar Rp27.900,672 milyar.

Gambaran mengenai perbandingan PDRB dari sisi pengeluaran antara proyeksi dan realisasi 2014 dan proyeksi 2015 dengan perubahannya sebagaimana tersaji pada Tabel II.3.

Tabel II.3
Perbandingan Proyeksi dan Realisasi PDRB menurut Pengeluaran
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2015 (ADHB) (RpMilyar)

Komponen Pengeluaran	2014		2015 (proyeksi)	
	Proyeksi*	Realisasi**	Semula*	Perubahan*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	23.695,80	29.321,258	26.368,01	24.565,98
2. Konsumsi LNPRT	431,70	339,264	491,33	433,8
3. Konsumsi Pemerintah	6.604,95	5.708,588	7.572,27	8.294,51
4. PMTB	11.404,16	12.989,796	12.363,68	11.802,12
5. Perubahan Inventori	1.886,51	1.201,018	2.046,20	1.697,98
6. Ekspor	23.317,80	27.900,672	25.346,41	24.015,83
7. <u>Dikurangi</u> Impor	24.171,30	-19.704,505	26.405,66	25.165,08
PDRB	43.169,61	56.389,853	47.782,24	45.645,17

Sumber: *BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

**BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sebesar 4,68 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,22 persen. Pertumbuhan ekonomi melambat diakibatkan masih terbatasnya pertumbuhan lapangan usaha utama. Lapangan usaha Industri Pengolahan pada tahun 2014 melambat 1,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang tumbuh 3,49 persen. Lapangan usaha Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor melambat 4,44 persen dibandingkan tahun 2013 sebesar 5,74 persen. Namun demikian lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan andil pertumbuhan terbesar yakni 1,65 persen, tumbuh 9,24 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 6,86 persen. Demikian pula lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dengan andil pertumbuhan 0,29 persen, tumbuh 1,97 persen dari tahun sebelumnya yang berkontraksi 0,64 persen. Pertumbuhan beberapa lapangan usaha tersebut menjadi faktor penahan perlambatan lebih dalam.

Menurut pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 4,68 persen melambat dibandingkan 2013 yaitu 5,22 persen. Pada tahun 2014, ekspor luar negeri merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 17,03 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebanyak 12,79 persen dan pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 6,79 persen. Peningkatan ekspor luar negeri disebabkan peningkatan ekspor logam timah dan indikasi penyebab tingginya Pengeluaran Konsumsi LNPRT adalah pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2014.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2015 yang sebesar 4,10 persen lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu 4,75 persen. Perlambatan diakibatkan kinerja lapangan usaha utama yang melambat. Dari sisi pengeluaran, perlambatan terjadi pada konsumsi rumah tangga sebagai dampak dari menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif daya listrik serta menurunnya tenaga kerja di sektor pertambangan. Ekspor luar negeri menurun disebabkan nilai ekspor komoditas timah melemah sebagai dampak melemahnya perekonomian global dan menurunnya harga timah dunia. Dan konsumsi pemerintah melambat didorong oleh rendahnya realisasi belanja pemerintah daerah.

Selanjutnya diperkirakan bahwa pada tahun 2015 lapangan usaha Pertanian akan meningkat yang didukung dengan meningkatnya panen sawit dan padi. Harga CPO terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan dalam negeri yang harus dipenuhi. Sektor pertambangan dan industri pengolahan berbasis timah diperkirakan masih akan melambat. Terhitung mulai 1 Mei 2015 diberlakukan kebijakan pembatasan ekspor timah yang akan menyebabkan volume ekspor menurun namun diharapkan mendongkrak harga timah.

Dari sisi permintaan, menurunnya kinerja sektor utama mengakibatkan berkurangnya konsumsi masyarakat yang pada akhirnya mendorong terbatasnya konsumsi masyarakat.

Selain itu terdapat sejumlah resiko yang dapat menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung yaitu:

- a. belum pulihnya ekonomi global;
- b. harga komoditas masih belum membaik;
- c. faktor cuaca yang kurang kondusif berpengaruh pada distribusi pasokan bahan pangan, tangkapan ikan, dan jumlah wisatawan yang berkunjung;
- d. depresiasi nilai tukar rupiah; dan
- e. kapasitas pengolahan CPO di Bangka Belitung masih sangat terbatas.

Berdasarkan kondisi ekonomi terkini dan prediksi shock yang akan terjadi di masa depan, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2015 yang semula diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,85 persen cukup sulit untuk tercapai. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi tahunan pada 2015 berada pada kisaran 4,8 – 5,2 persen.

Gambaran mengenai realisasi dan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2014-2015 dapat terlihat pada Tabel II.4.

Tabel II.4
Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2015 (persen)

LPE	2014		2015		
	Proyeksi	Realisasi	Realisasi Trw 1	Proyeksi Semula	Proyeksi Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHK 2000	5,56	4,70	4,10	5,85	4,8 – 5,2
ADHK 2010	5,56	4,68	n.a	5,85	4,8 – 5,2

Sumber: BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015 (diolah)

C. PDRB Per Kapita

Meskipun bukan merupakan indikator yang terbaik untuk menilai kinerja pembangunan daerah, namun PDRB per kapita termasuk indikator yang paling sering digunakan sebagai tolok ukur kesejahteraan penduduk di suatu wilayah.

Pada tahun 2014, realisasi PDRB per kapita penduduk Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp41,9 juta, lebih tinggi jika dibandingkan dengan proyeksi semula yang sebanyak Rp31,8 juta.

Sementara itu untuk tahun 2015 PDRB per kapita semula diproyeksikan sebanyak Rp33,6 juta, dengan memperhatikan proyeksi PDRB 2015 dan laju pertumbuhan penduduk, maka diperkirakan PDRB per kapita tahun 2015 akan sebanyak Rp43,9 juta.

D. Inflasi

Pada tahun 2014 inflasi Kota Pangkalpinang sebesar 6,81 persen, mendekati batas atas proyeksi semula yang sebesar 5,5 – 7,0 persen. Secara umum inflasi tahun 2014 di Kota Pangkalpinang lebih fluktuatif dibanding dengan inflasi nasional. Tercatat terjadi empat kali inflasi bulanan lebih tinggi daripada nasional. Namun secara kumulatif, inflasi tahun 2014 di Kota Pangkalpinang hanya 6,81 persen, sementara Nasional menembus 8,36 persen. Sementara itu, inflasi tahun 2014 di Tanjungpandan menembus angka 13,14 persen. Jauh lebih tinggi dari

inflasi nasional. Sepanjang 2014, terjadi tujuh kali inflasi di Tanjungpandan lebih tinggi dari nasional.

Pada triwulan I tahun 2015, inflasi Kota Pangkalpinang sebesar 6,89 persen. Secara keseluruhan diperkirakan inflasi tahun 2015 akan berada pada kisaran 5 ± 1 (4 – 6) persen. Angka ini masih dalam rentang perkiraan sebelumnya yang berada pada kisaran 5 – 6 persen.

2.4 Lain-lain Asumsi

A. Ketenagakerjaan

Persentase pengangguran terbuka pada Agustus 2014 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2013. TPT pada Agustus 2013 sebesar 3,70 persen menjadi 5,14 persen pada 2014. Peningkatan angka pengangguran ini disebabkan oleh banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja pada sektor pertambangan. Penurunan produktivitas sektor pertambangan secara gradual menyebabkan meningkatnya pengangguran pada sektor ini. Realisasi 2014 ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi semula yang berada pada kisaran 3,4 persen.

Pada tahun 2015, semula diperkirakan pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berada pada kisaran 3,05 persen. Namun memperhatikan kondisi yang berkembang dimana sampai dengan Februari 2015, tingkat pengangguran terbuka sebanyak 3,35 persen sehingga diperkirakan pada tahun 2015 angka pengangguran terbuka akan berada pada kisaran angka 4,88 persen. Sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan masih menjadi sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja.

B. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode bulan September 2014 sebesar 67,23 ribu orang (4,97%). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2014 yang berjumlah 71,64 ribu orang (5,36%), berarti jumlah penduduk miskin turun 4,41 ribu orang dan persentasenya turun sebesar 0,39 persen jika dibandingkan periode Maret 2014.

Selama periode Maret 2014 – September 2014, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun sebesar 2,35 ribu orang, demikian pula di daerah perkotaan mengalami penurunan jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 2,06 ribu orang.

Selama Maret 2014 – September 2014 Garis Kemiskinan naik 5,77 persen yaitu dari Rp. 444.171,- per kapita per bulan pada bulan Maret 2014 menjadi Rp.469.814,- per kapita per bulan pada bulan September 2014.

Pada periode Maret 2014 – September 2014 Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,730 pada Maret 2014 menjadi 0,601 pada September 2014. Kenaikan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada September 2014 cenderung mendekati garis kemiskinan jika dibandingkan periode Maret 2014. Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan dibanding dengan periode Maret 2014 yaitu dari 0,157 menjadi 0,115. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menurun sejak Maret 2014 hingga September 2014.

Dengan kondisi ini, maka sampai dengan berakhirnya tahun 2015 diperkirakan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berada pada kisaran 4,75 persen. Upaya-upaya untuk menekan angka kemiskinan harus segera dilakukan dan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara efektif. Program Raskintis dan Program SATAM EMAS perlu terus didorong untuk mengatasi kemiskinan terutama di perdesaan. Selain itu perlu adanya kebijakan khusus pada tahun 2015 untuk perluasan lapangan kerja dan menyangga kelompok menengah dan kelompok hampir miskin.

2.5 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2015, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD T.A 2015 mempertimbangkan:
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
 - b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester I tahun 2015;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014.
2. Penyesuaian dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Penyesuaian alokasi dana Penyesuaian yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpedoman pada Keputusan Penetapan Alokasi dari Kementerian Keuangan
4. Penyesuaian pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Perubahan terhadap kebijakan pendapatan daerah didasarkan oleh tidak tercapainya asumsi target pendapatan dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dan Dana Alokasi Khusus pada dana perimbangan serta dana penyesuaian dan otonomi khusus pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2015 meliputi:

- 1) Pajak daerah mengalami penurunan sebesar 3,27 persen, semula ditargetkan sebesar Rp517.786.492.706,82 menjadi Rp500.844.014.371,82 atau berkurang sebesar Rp16.942.478.335,00;
- 2) Retribusi daerah semula ditargetkan Rp6.139.822.450,00, terealisasi sebesar Rp8.445.970.86,00 atau mengalami peningkatan sebesar 37,56%;
- 3) Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak semula ditargetkan sebesar Rp194.380.281.000,00, namun terealisasi sebesar Rp226.155.287.000,00 atau meningkat sebesar Rp31.775.006.000,00 (2,77%) dari yang ditargetkan;
- 4) Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 4,77% semula ditargetkan sebesar Rp44.295.751.089,69 menjadi Rp42.181.234.295,72 atau berkurang sebesar Rp2.114.516.793,97;
- 5) Dana Alokasi Khusus semula ditargetkan Rp55.444.770.000,00, terealisasi sebesar Rp55.444.770.000,00 atau tidak mengalami peningkatan dan penurunan (stabil);
- 6) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang semula ditargetkan sebesar Rp179.626.400.000,00, pada realisasinya sebesar Rp179.626.400.000,00 atau tidak mengalami peningkatan dan penurunan (stabil).

Secara keseluruhan dari sisi pendapatan, target yang semula ditetapkan sebesar Rp1.903.060.960.246,51 terealisasi sebesar 100,79 persen menjadi Rp1.918.085.118.953,54 sehingga dari asumsi yang semula ditargetkan meningkat sebesar Rp15.024.158.707,03 (0,79%).

Gambaran umum tentang perubahan kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 disajikan pada Tabel II.5.



Tabel II.5
Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2015

NO	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1	Pendapatan asli daerah	575.722.066.246,51	558.971.218.953,54	(16.750.847.292,97)
1.1.1	Pajak daerah	517.786.492.706,82	500.844.014.371,82	(16.942.478.335,00)
1.1.2	Retribusi daerah	6.139.822.450,00	8.446.070.286,00	-
1.1.2	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	44.295.751.089,69	42.181.134.295,72	(2.114.616.793,97)
1.2	Dana perimbangan	1.147.712.494.000,00	1.179.487.500.000,00	31.775.006.000,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	194.380.281.000,00	226.155.287.000,00	31.775.006.000,00
1.2.2	Dana alokasi umum	897.887.443.000,00	897.887.443.000,00	-
1.2.3	Dana alokasi khusus	55.444.770.000,00	55.444.770.000,00	-
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	179.626.400.000,00	179.626.400.000,00	-
1.3.1	Hibah	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	-	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	179.626.400.000,00	179.626.400.000,00	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Daerah (1,1 +1,2+1,3)	1.903.060.960.246,51	1.918.085.118.953,54	15.024.158.707,03

2.6 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015.

A. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2015 dengan kenaikan gaji yang dirapel beberapa bulan.

Tambahan penghasilan hanya diberikan kepada PNS/CPNSD dan direncanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

2) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dianggarkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak akibat melemahnya harga komoditas pertanian (karet dan kelapa sawit) serta akibat adanya regulasi tentang pembatas usaha sektor pertambangan. Selain itu juga untuk membantu masyarakat miskin lainnya berupa subsidi terhadap bahan makanan pokok dan bahan konsumsi lainnya.

3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik dianggarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam dan bencana sosial.

B. Belanja Langsung

Perubahan kebijakan belanja langsung daerah tahun 2015 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Penyesuaian alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat;
- c) Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 dihindari, dan direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku;
- d) Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik (kontruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian sampai dengan batas akhir pembayaran pekerjaan pada minggu kedua bulan Desember 2015 dan tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali mengalami *force majeure*;
- e) Belanja Pegawai
 - (1) Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga tahun 2015 yang berlaku.
 - (2) Upah/honor THL dihitung sesuai ketentuan tentang pedoman pemberian upah bagi tenaga honorer daerah/THL dan penetapan upah bagi tenaga honorer daerah dan pekerja harian lepas di jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015.
- f) Belanja Barang dan Jasa
 - (1) Penambahan anggaran sektor ekonomi produktif (pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan, dan KUMKM) sebagai upaya menstimulasi masyarakat yang terkena dampak sebagai akibat dari melambannya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - (2) Belanja barang dan jasa di setiap SKPD digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan tidak menambah nilai aset/modal, termasuk belanja pemeliharaan.
 - (3) Dalam perubahan APBD, anggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran 2014.

- (4) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.
- (5) Belanja pemeliharaan aset barang, infrastruktur, konstruksi dianggarkan pada belanja barang dan jasa.
- (6) Penganggaran belanja modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa.

g) Belanja Modal

- (1) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal.
- (2) Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut.
- (3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi.
- (4) Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya, mengingat perubahan APBD mempunyai durasi waktu efektif pelaksanaan hanya 3 bulan.

Gambaran umum perubahan target kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 disajikan pada Tabel II.6 berikut.



Tabel II.6
Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2015

NO	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.152.668.096.324,73	1.227.226.698.686,74	74.558.602.361,01
2.1.1	Belanja pegawai	329.023.179.838,35	346.166.825.657,39	17.143.645.819,04
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	-
2.1.4	Belanja hibah	284.091.950.000,00	289.428.845.000,00	5.586.895.000,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	1.000.000.000,00	1.228.500.000,00	228.500.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	280.474.272.314,38	332.323.833.856,35	52.010.211.541,97
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	256.078.694.172,00	256.078.694.172,00	-
2.1.8	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	1.152.668.096.324,73	1.227.226.698.686,74	74.558.602.361,01
2.2	Belanja Langsung	977.894.380.560,50	1.011.512.065.910,50	33.617.685.349,00
2.2.1	Belanja pegawai	91.216.604.900,00		
2.2.2	Belanja barang dan jasa	575.987.487.344,50		
2.2.3	Belanja modal	310.690.288.316,00		
	Jumlah Belanja Langsung	977.894.380.560,50	1.011.101.415.909,50	33.207.035.349,00
	Total Jumlah Belanja	2.130.562.476.885,23	2.238.738.764.595,24	108.176.287.710,01

2.7 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan karena tercapainya asumsi target penerimaan pembiayaan daerah berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015, dimana semula Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) ditargetkan sebesar Rp227.501.516.638,72 terealisasi sebesar Rp325.653.645.641,70 atau sebesar 56,86 persen atau dengan kata lain menurun sebesar Rp98.152.129.002,98 atau 43,14 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara umum pemanfaatan SILPA ini akan dialokasikan untuk:

- 1) kenaikan gaji pegawai sebesar Rp 17.143.645.819,04
- 2) belanja hibah sebesar Rp5.336.895.000,00
- 3) belanja bantuan sosial sebesar Rp228.500.000,00
- 4) belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Parpol sebesar Rp51.849.561.541,97
- 5) belanja pembangunan yang dilaksanakan SKPD sebesar Rp. 33.617.685.394,00
- 6) penyertaan modal (investasi) daerah kepada PT. JAMKRIDA BABEL sebesar Rp5.000.000.000,00.

Secara lengkap, gambaran umum tentang perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disajikan pada Tabel II.7.



Tabel II.7
Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2015

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
3.1	Penerimaan pembiayaan	260.398.812.107,81	201.966.080.663,95	(58.432.731.443,86)
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	260.398.812.107,81	201.966.080.663,95	(58.432.731.443,86)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	260.398.812.107,81	201.966.080.663,95	(58.432.731.443,86)
3.2	Pengeluaran pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	-	
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
	Jumlah Pembiayaan Netto	260.398.812.107,81	201.966.080.663,95	(58.432.731.443,86)